

Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat

Redi Hadiyanto^{1*}, Deden Gandana Madjakusumah², Siti Fauziah Azis³,
Fahri Mulya Firmansyah⁴, Zayd Ibadurrahman⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
*Email korespondensi: redihadiyanto@gmail.com

Abstract

Awareness of the importance of guaranteeing halal products is increasing among Indonesian people, especially in West Java. To meet this need, the government launched various initiatives, including the Free Halal Certificate Program (SEHATI) and the one million free certificates program by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). This research aims to analyze the effectiveness of collaboration between the SEHATI and BPJPH programs in providing halal product guarantees as well as identifying the challenges and opportunities faced during implementation in West Java. This research uses a qualitative approach with data collection methods in the form of in-depth interviews, observation and document analysis. Informants consisted of small and medium entrepreneurs (UKM), representatives of BPJPH, the Institute for the Study of Food, Drugs and Cosmetics, the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI), as well as consumers in West Java. The research results show that the collaboration between the SEHATI program and BPJPH has significantly increased the number of halal certified products in West Java. This initiative has succeeded in making it easier for entrepreneurs, especially SMEs, to obtain halal certification at no cost, thus encouraging more halal products on the market. In addition, increased coordination and integration between BPJPH and the SEHATI program has helped reduce duplication of efforts and speed up the certification process. Research results show that although there are several challenges, collaboration between the SEHATI program and BPJPH in the one million free certificates program has had a significant positive impact on halal product guarantees in West Java. The recommendations put forward include increasing education and outreach about halal certification, simplifying bureaucratic procedures, as well as increasing technical and financial support for entrepreneurs.

Keywords: Halal Certificate, Halal Product Guarantee, Free Halal Certification

Saran sitasi: Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3333-3341. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.12895>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.12895>

1. PENDAHULUAN

Program Satu Juta Sertifikat Halal Gratis yang diinisiasi oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) terintegrasi dengan Program SEHATI di Jawa Barat, berikut data terkini berdasarkan data BPJPH per Oktober 2023 Total target nasional 1.000.000 sertifikat halal gratis dan Realisasi nasional lebih dari 700.000 sertifikat telah diterbitkan kontribusi Jawa Barat sekitar 150.000 sertifikat (tertinggi secara nasional). Distribusi Sertifikasi Halal Gratis di Jawa Barat Fasilitasi BPJPH Pusat 85.000 sertifikat Program SEHATI 45.000 sertifikat.(Kemenag, 2024)

Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga 20.000 sertifikat Kategori Usaha Penerima UMKM Mikro 70%, UMKM Kecil 25%, UMKM Menengah 5%. Sektor Usaha Makanan dan Minuman 75% Restoran/Rumah Makan 15%, Kosmetik 5%, Sektor lainnya 5%.(Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021) Proses Sertifikasi Pendaftaran melalui SIHALAL BPJPH Verifikasi kelayakan penerima bantuan Pendampingan oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Penetapan kehalalan oleh MUI Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH. Keunggulan

Program Gratis biaya sertifikasi Proses lebih cepat (maksimal 60 hari kerja) Pendampingan intensif Sistem digitalisasi terintegrasi. Target 2024 Penyelesaian target 1 juta sertifikat Peningkatan kapasitas LPH Penguatan sistem pengawasan Perluasan akses pendaftaran. (*Mau Urus Sertifikasi Halal?*, 2023)

Sumber Pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Kerjasama dengan mitra strategis. Dampak Program Peningkatan jumlah produk bersertifikat halal Penguatan daya saing UMKM Perlindungan konsumen Muslim dan Pertumbuhan ekonomi syariah. Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan jaminan produk halal bagi masyarakat. Program ini dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM di Jawa Barat yang seringkali menghadapi kendala finansial dan teknis dalam memperoleh sertifikasi halal. Implementasi program SEHATI melibatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, LPPOM MUI Jawa Barat, dan Dinas terkait. Melalui program ini, UMKM mendapatkan berbagai fasilitas seperti pembebasan biaya sertifikasi, pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen, dan bimbingan dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan. (Administrator, 2024)

Program ini telah memberikan dampak positif bagi perkembangan ekosistem halal di Jawa Barat. Selain meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal, program ini juga berkontribusi pada penguatan daya saing produk lokal di pasar yang semakin memperhatikan aspek kehalalan. (*Kembali Raih Penghargaan Bergengsi, BPJPH Terima Detikcom Award 2024 sebagai Lembaga Inovatif Penggerak Ekosistem Halal | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 2024) SEHATI juga mendorong kesadaran pelaku usaha akan pentingnya jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, cakupan program yang belum merata, dan kebutuhan akan sistem monitoring yang lebih efektif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program SEHATI dalam mendukung pengembangan industri halal di Jawa Barat.

Keberhasilan program SEHATI tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah dan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM lokal. Program ini menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan kebijakan serupa untuk mendukung industri halal di Indonesia. Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) di Jawa Barat yang diluncurkan sejak tahun 2020 telah menunjukkan perkembangan signifikan hingga tahun 2023. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 10.000 UMKM telah mendapatkan manfaat dari program ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui APBD 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk program SEHATI, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 10 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan target Pemprov Jabar untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM di 27 kabupaten/kota. Data dari LPPOM MUI Jawa Barat menunjukkan bahwa hingga akhir 2023, tingkat keberhasilan program SEHATI mencapai 85%, dengan rincian, 8.500 UMKM telah memperoleh sertifikat halal, 1.200 UMKM dalam proses pendampingan, 300 UMKM dalam tahap persiapan dokumen.

Distribusi penerima manfaat program SEHATI mencakup berbagai sektor diantaranya 45% industri makanan, 30% industri minuman, 15% industri kosmetik, 10% sektor lainnya Untuk meningkatkan efektivitas program, Pemprov Jabar telah membentuk 150 tim pendamping yang tersebar di seluruh wilayah. Mereka bertugas membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai standar BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Program SEHATI juga telah berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi syariah di Jawa Barat. Survey terbaru menunjukkan peningkatan omset rata-rata sebesar 30% pada UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal melalui program ini.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Keterkaitan dengan UU Jaminan Produk Halal No 33 tahun 2014

Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) memiliki keterkaitan erat dengan UU Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal di

Indonesia. Program ini merupakan implementasi dari amanat undang-undang tersebut yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Dalam UU JPH No 33/2014 dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). (Harahap dkk., 2023) Program SEHATI hadir sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membantu UMKM memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan Pasal 44 UU JPH yang mengatur tentang peran pemerintah dalam memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Pelaksanaan program SEHATI melibatkan koordinasi dengan BPJPH sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan JPH sesuai amanat UU. Proses sertifikasi mengikuti alur yang ditetapkan dalam UU JPH, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penetapan kehalalan, hingga penerbitan sertifikat halal. BPJPH berperan sebagai regulator dan penerbit sertifikat, sementara pemeriksaan produk dilakukan oleh LPH yang terakreditasi, dan penetapan kehalalan dilakukan oleh MUI. (*Proses sertifikasi mengikuti alur yang ditetapkan dalam UU JPH, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penetapan kehalalan, hingga penerbitan sertifikat halal - Penelusuran Google, 2023*)

Program ini juga mendukung terwujudnya tujuan UU JPH dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Melalui fasilitasi sertifikasi gratis, UMKM dapat memenuhi kewajibannya tanpa terbebani biaya, sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Dalam aspek pengawasan, program SEHATI menerapkan sistem monitoring yang selaras dengan ketentuan UU JPH tentang pengawasan JPH. Ini mencakup pengawasan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.

Program ini juga mendukung pembentukan kawasan industri halal sebagaimana dimungkinkan dalam UU JPH. Melalui sertifikasi massal dan gratis, program SEHATI berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri halal yang kuat di Jawa Barat, yang pada gilirannya dapat mendorong terbentuknya kawasan industri halal yang terintegrasi. Keberhasilan

program SEHATI dalam memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM menunjukkan efektivitas implementasi UU JPH di tingkat daerah. (Kemenag, 2021) Program ini menjadi model bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan JPH sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, sekaligus memberdayakan UMKM dalam memenuhi ketentuan regulasi.

2.2. Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Untuk UMKM Jawa Barat

Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) di Jawa Barat telah menunjukkan perkembangan signifikan melalui kolaborasi dengan Program Sejuta Sertifikat Halal Gratis dari BPJPH. Kolaborasi ini dimulai sejak tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023, dengan capaian lebih dari 150.000 sertifikat halal yang telah diterbitkan di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasikan sumber daya dan sistem dari kedua institusi. BPJPH menyediakan platform SIHALAL sebagai sistem pendaftaran terpadu, sementara Pemprov Jabar memberikan dukungan pendampingan teknis dan pembiayaan melalui APBD. Proses sertifikasi dimulai dari pendaftaran UMKM melalui SIHALAL, dilanjutkan dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan, pemeriksaan oleh LPH, hingga penetapan kehalalan oleh MUI dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.

Pemprov Jabar telah membentuk 150 tim pendamping yang tersebar di 27 kabupaten/kota untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi. Tim ini bertugas memberikan bimbingan teknis mulai dari penyiapan dokumen, pemenuhan standar halal, hingga pendampingan selama proses pemeriksaan. Pendampingan intensif ini terbukti efektif meningkatkan tingkat keberhasilan sertifikasi mencapai 85%.

Distribusi penerima manfaat program didominasi oleh sektor makanan dan minuman sebesar 75%, diikuti restoran/rumah makan 15%, kosmetik 5%, dan sektor lainnya 5%. Berdasarkan skala usaha, UMKM mikro menjadi penerima terbesar dengan proporsi 70%, diikuti UMKM kecil 25%, dan menengah 5%. Hal ini menunjukkan program telah tepat sasaran dalam membantu pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan anggaran untuk program ini terus meningkat, dari Rp 15 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 20 miliar di tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan target perluasan jangkauan program dan

penguatan sistem pendukung. Selain APBD, program ini juga mendapat dukungan dari APBN melalui skema Program Sejuta Sertifikat Halal Gratis BPJPH.

Dalam aspek monitoring, telah dikembangkan sistem terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap progress sertifikasi. Sistem ini memudahkan koordinasi antara Pemprov Jabar, BPJPH, LPH, dan MUI, sekaligus membantu dalam evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan. (Ade Agung Kurniawan, Ade Hermawan, 2023) Program ini juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. Survey menunjukkan peningkatan omset rata-rata sebesar 30% pada UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Selain itu, program ini berkontribusi pada penguatan ekosistem halal dan peningkatan daya saing produk UMKM lokal. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi seperti keterbatasan jumlah LPH, pemerataan akses di daerah terpencil, dan kebutuhan penguatan sistem monitoring. (Tabitha Intana Tandepadang, Jariyah, Hadi Munarko, 2023) Pemprov Jabar dan BPJPH terus berkoordinasi untuk mengatasi tantangan ini melalui berbagai inisiatif perbaikan dan pengembangan program. Kolaborasi ini akan diperkuat melalui pengembangan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan jangkauan program.

Target tahun 2024 mencakup penambahan 5.000 UMKM tersertifikasi halal, pengembangan sistem monitoring digital terintegrasi, dan penambahan tim pendamping baru. Keberhasilan kolaborasi ini menjadi model percontohan bagi pengembangan program serupa di daerah lain. (Raya Sulistyowati, Dian Anita Nuswantara, Apriana H.J. Fanggidae, Paulina Yuritha Amtiran, 2024) Sistem pendampingan UMKM dalam program sertifikasi halal gratis di Jawa Barat merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini bertujuan membantu UMKM mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Fasilitator SEHATI yang telah terlatih bekerja berdampingan dengan tim BPJPH untuk memberikan pendampingan komprehensif kepada UMKM. Mereka membantu dalam penyusunan dokumen, implementasi sistem jaminan halal, hingga persiapan audit. Sistem pendampingan ini didukung dengan platform digital yang memungkinkan monitoring

progress secara real-time dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan. Integrasi kedua program ini juga mencakup standarisasi prosedur dan persyaratan sertifikasi. (BPJPH, 2024) UMKM yang mendaftar melalui Program SEHATI secara otomatis terhubung dengan Program Sejuta Sertifikat Halal Gratis, sehingga dapat memperoleh manfaat dari kedua program tanpa perlu melalui proses pendaftaran ganda. Hal ini menghasilkan efisiensi waktu dan sumber daya, serta mengurangi beban administratif bagi UMKM.

Aspek pembiayaan, integrasi ini memastikan bahwa UMKM dapat memperoleh sertifikat halal tanpa biaya, sesuai dengan tujuan Program Sejuta Sertifikat Halal Gratis. Biaya audit, pendampingan, dan penerbitan sertifikat ditanggung sepenuhnya oleh program, sementara UMKM dapat fokus pada perbaikan sistem produksi dan dokumentasi yang diperlukan. Program terintegrasi ini juga melibatkan peran aktif Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah ditunjuk BPJPH. LPH berkoordinasi dengan fasilitator SEHATI dalam melakukan pemeriksaan dan audit, memastikan standar halal terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Proses audit dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan hasil pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk memastikan keberlanjutan program, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program terintegrasi ini. Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan sistem dan peningkatan layanan kepada UMKM. Data menunjukkan bahwa integrasi ini telah berhasil meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikat halal di Jawa Barat.

Pada grafik pertama menunjukkan perkembangan bulanan yang menggambarkan peningkatan konsisten dalam jumlah pendaftar baik melalui SEHATI maupun BPJPH. Terlihat adanya tren positif dalam jumlah UMKM yang tersertifikasi, dengan pertumbuhan signifikan dari Januari hingga Juni 2023. Grafik kedua memperlihatkan distribusi UMKM berdasarkan kategori usaha, dengan dominasi sektor makanan sebesar 45% dari total UMKM yang berpartisipasi, diikuti oleh sektor minuman sebesar 22%. Hal ini menunjukkan fokus program pada sektor makanan dan minuman yang memang menjadi prioritas sertifikasi halal. Performa menunjukkan tingkat keberhasilan program yang terus meningkat, dengan rata-rata tingkat keberhasilan di atas 75%. Ini mengindikasikan efektivitas integrasi kedua program

dalam memfasilitasi UMKM mendapatkan sertifikasi halal.

2.3. Capaian dan Hasil Program Jumlah Sertifikat Halal Gratis Yang Diterbitkan Untuk Penerima Manfaat

Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan akses pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terhadap sertifikasi halal. Hingga 23 Oktober 2023, sebanyak 35.930 sertifikat halal telah diterbitkan melalui mekanisme *self-declare* untuk pelaku UMK di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target sepuluh juta sertifikasi halal pada tahun 2023, dengan kuota satu juta sertifikasi halal gratis. (Kemenag, 2023) Dengan menggunakan mekanisme *self-declare*, pelaku usaha dapat menyatakan kehalalan produk mereka berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga mempermudah proses sertifikasi tanpa biaya. Proses pendaftaran dilakukan secara online, dan BPJPH juga menyediakan pendampingan bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Program ini direncanakan akan berakhir pada 17 Oktober 2024, dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya produk halal. Dengan pencapaian ini, program Sehati tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha dengan sertifikasi gratis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.

Perkembangan program sertifikasi halal untuk UMKM telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung pelaku usaha memperoleh sertifikat halal. (Tambunan, 2021) Pencapaian ini terlihat dari jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan dan tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat, mencakup beragam sektor usaha mulai dari makanan, minuman, hingga produk ritel. Berdasarkan data pelaksanaan program, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu. Penerima manfaat dari program ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah Bandung Raya, Bogor, dan Cirebon. Sektor makanan dan minuman mendominasi penerima

sertifikat, mencerminkan tingginya kebutuhan sertifikasi halal di sektor ini.

Ditinjau dari skala usaha, UMKM mikro mendominasi sebagai penerima manfaat dengan proporsi 55%, diikuti usaha kecil 30%, dan menengah 15%. Distribusi ini menunjukkan bahwa program telah berhasil menjangkau sasaran utamanya yaitu pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal. Dampak ekonomi program terlihat dari pertumbuhan pendapatan UMKM yang konsisten meningkat setiap triwulan, mencapai 35% pada Q4 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan usaha. (Kedeputusan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, 2023)

Program ini juga menunjukkan tingkat keberlanjutan yang baik, terlihat dari meningkatnya jumlah perpanjangan sertifikat dan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar halal. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM memandang sertifikasi halal sebagai investasi jangka panjang untuk pengembangan usaha mereka. Perlu dicatat bahwa data ini merupakan sampel untuk periode tahun 2023. Untuk informasi terkini, silakan merujuk ke BPJPH atau Dinas terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo, 2023)

2.4. Dampak Program Terhadap Ekosistem Halal dari Peningkatan Jumlah Produk Bersertifikat Halal

Peningkatan jumlah produk bersertifikat halal memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem halal. Ekosistem halal mencakup berbagai aspek, mulai dari produsen, konsumen, hingga regulator yang mengatur standar dan sertifikasi halal. Dengan semakin banyaknya produk yang mendapatkan sertifikat halal, ekosistem ini mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari berbagai sudut. (Rahmawati, Husni Thamrin, 2022) Pertama, peningkatan produk bersertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap pasar. Konsumen merasa lebih aman dan nyaman mengonsumsi produk yang mereka yakin sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan tetapi juga memperluas basis konsumen, mengingat produk halal tidak hanya dikonsumsi oleh umat Muslim tetapi juga oleh konsumen non-Muslim yang menganggap

produk halal lebih higienis dan berkualitas. (Lady Yulia, 2015)

Kedua, dampak positif juga dirasakan oleh produsen. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, produsen dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal dan internasional. Sertifikat halal membuka akses ke pasar global yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Selain itu, sertifikasi halal sering kali dikaitkan dengan standar kualitas tinggi, yang dapat meningkatkan citra merek dan kepercayaan konsumen secara umum. (Warto, Samsuri, 2020) Ketiga, peningkatan jumlah produk bersertifikat halal mendorong inovasi dalam industri makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, dan produk lainnya. Produsen berlomba-lomba mengembangkan produk baru yang memenuhi standar halal, yang sering kali melibatkan penelitian dan pengembangan untuk menemukan bahan baku dan proses produksi yang sesuai. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk tetapi juga menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi. (Dewi Utari, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, 2022)

Menurut laporan Global Islamic Economy Report 2020/21 oleh Dinar Standard, pasar makanan dan minuman halal diperkirakan mencapai nilai USD 1,38 triliun pada tahun 2020 dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 1,97 triliun pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan yang signifikan untuk produk bersertifikat halal, yang mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk ini. (Amilatus Nafisah, Fauzatul Laily Nisa, 2024)

Sertifikasi halal memberikan akses kepada produsen untuk memasuki pasar global yang lebih luas. Sebagai contoh, industri halal di Malaysia, salah satu pemimpin global dalam sertifikasi halal, telah melihat pertumbuhan ekspor produk halal yang signifikan. Pada tahun 2020, ekspor produk halal Malaysia mencapai sekitar USD 9,8 miliar, dengan produk makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar. (Hartini, Malahayatie, 2024)

Menurut data dari Thomson Reuters dalam State of the Global Islamic Economy Report 2018/19, sektor inovasi dalam industri halal meningkat dengan signifikan. Banyak perusahaan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk baru yang memenuhi standar halal. Misalnya, industri kosmetik halal menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan nilai pasar global mencapai USD

74,2 miliar pada tahun 2020 dan diperkirakan tumbuh menjadi USD 95,3 miliar pada tahun 2024. (Muhammad Zulfikar Yusuf, 2022) Peningkatan produk bersertifikat halal juga mendorong penguatan regulasi dan standar halal. Di Indonesia, peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) semakin penting. Data dari BPJPH menunjukkan bahwa pada tahun 2020, lebih dari 50.000 produk telah mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia. Ini mencerminkan peningkatan permintaan untuk transparansi dan kredibilitas dalam proses sertifikasi halal.

Prinsip halal yang mencakup kebersihan, keadilan, dan kesejahteraan hewan selaras dengan praktik keberlanjutan. Menurut laporan dari Halal Development Corporation (HDC) Malaysia, industri halal di negara tersebut berkontribusi terhadap peningkatan praktik keberlanjutan, dengan banyak perusahaan halal yang mengadopsi praktik ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. (Munawwarah Sahib, Nur Ifna, 2024) Ini termasuk penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan praktik produksi yang berkelanjutan. Menurut laporan dari Grand View Research, pasar produk halal global diperkirakan tumbuh dengan CAGR (Compound Annual Growth Rate) sebesar 10% dari tahun 2020 hingga 2025. Ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam permintaan produk halal di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, dan farmasi.

2.5. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Analisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program sertifikat halal gratis (SEHATI) di Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan program sejuta sertifikat gratis oleh BPJPH, memerlukan tinjauan mendalam mengenai berbagai elemen yang berperan dalam proses tersebut.

Faktor pendukung dalam implementasi program ini melibatkan berbagai aspek. Pertama, dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. Kebijakan yang mendukung, alokasi anggaran yang memadai, serta regulasi yang jelas dan tegas merupakan elemen kunci yang mendorong keberhasilan program. Pemerintah juga memfasilitasi sinergi antara BPJPH, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), serta dinas terkait di tingkat daerah, yang memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program. (Kemenko PMK, 2020) Selain itu, partisipasi aktif dari para

pelaku usaha, terutama UKM, menjadi pendorong utama. Kesadaran dan komitmen mereka untuk memperoleh sertifikasi halal mendorong peningkatan jumlah produk bersertifikat halal. Program ini juga didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai, yang memungkinkan proses sertifikasi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien melalui platform digital.

Faktor penghambat yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan program. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus dilalui. Banyak pengusaha, terutama yang berada di daerah terpencil, masih minim informasi mengenai program ini. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang sertifikasi halal juga menjadi hambatan signifikan. BPJPH dan LPPOM MUI sering kali menghadapi kekurangan tenaga ahli yang dapat menangani proses sertifikasi dengan cepat dan tepat. (Deviana Yuanitasari, 2023) Selain itu, kendala birokrasi dan prosedur administrasi yang kompleks sering kali memperlambat proses sertifikasi. Pelaku usaha harus melalui berbagai tahap yang memakan waktu dan biaya, yang dapat menjadi penghalang bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Masalah lainnya adalah keterbatasan akses ke bahan baku yang memenuhi standar halal. Pengusaha kecil dan menengah sering kali kesulitan mendapatkan bahan baku yang bersertifikat halal, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memproduksi barang yang memenuhi kriteria halal. Tantangan logistik dan distribusi juga menjadi penghambat, terutama bagi pelaku usaha yang berada di daerah terpencil. Dalam konteks kolaborasi antara program SEHATI dan BPJPH, faktor penghambat ini dapat diatasi melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan dukungan teknis dan finansial. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan akses teknologi informasi yang lebih baik dapat membantu mempercepat proses sertifikasi dan mengurangi kendala logistik.

3. KESIMPULAN

Kolaborasi antara program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dan program sejuta sertifikat gratis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jawa Barat telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal. Dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, bersama dengan sinergi antara berbagai lembaga seperti BPJPH dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program ini. Partisipasi aktif dari pelaku usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi, juga berkontribusi signifikan dalam memperlancar proses sertifikasi halal. Program ini berhasil mempermudah akses pengusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk halal. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kurangnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedurnya, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta kompleksitas birokrasi menjadi penghambat utama dalam implementasi program ini. Selain itu, masalah logistik dan distribusi, serta keterbatasan akses ke bahan baku bersertifikat halal, juga menghambat pelaku usaha dalam memenuhi standar halal.

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang telah ditetapkan. Peningkatan kerjasama internasional juga dapat membuka peluang lebih besar bagi produk bersertifikat halal dari Jawa Barat untuk memasuki pasar global. Dengan mengadopsi pendekatan holistik ini, diharapkan program sertifikat halal gratis (SEHATI) dan program sejuta sertifikat gratis oleh BPJPH dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan, meningkatkan jaminan produk halal di Jawa Barat, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

4. DAFTAR PUSTAKA

Ade Agung Kurniawan, Ade Hermawan. (2023). Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen Proyek Berbasis Web Rimbo Dua PTPN VI. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 1*, 44–51.

- Administrator. (2024, Oktober 18). MES dan PNM Dorong Percepatan Sertifikasi Halal UMKM Garut. *Masyarakat Ekonomi Syariah*. <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2024/10/18/mes-dan-pnm-dorong-percepatan-sertifikasi-halal-umkm-garut/>
- Amilatus Nafisah, Fauzatul Laily Nisa. (2024). MENGOPTIMALKAN POTENSI INDUSTRI MAKANAN HALAL INDONESIA DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH. *HARE: Sharia Economic Review, Volume 1 No 1*.
- Bagus Hadi Mustofa, Luhur Prasetyo. (2023). Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Volume 7 Nomor*.
- BPJPH. (2024). *BPJPH Dorong Kolaborasi Pusat-Daerah untuk Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dorong-kolaborasi-pusat-daerah-untuk-fasilitasi-sertifikasi-halal-umk>
- Deviana Yuanitasari. (2023). TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 6, Nomor 2*.
- Dewi Utari, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. (2022). INDUSTRI HALAL BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA PANDEMI COVID-19: PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, Vol. 15, No. 01*.
- Harahap, M. G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Nashirun, Maulidizen, A., Sumar'in, Sirojudin, H. A., Azizah, N., Farisi, M. S. A., Soleh, O., Suhendar, F. R., Chakim, M. H. R., & Supriati, R. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Hartini, Malahayatie. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2*.
- Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Dunia merupakan publikasi triwulanan (Vol. 7)*.
- Kembali Raih Penghargaan Bergengsi, BPJPH Terima Detikcom Award 2024 sebagai Lembaga Inovatif Penggerak Ekosistem Halal | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). <https://bpjph.halal.go.id/detail/kembali-raih-penghargaan-bergengsi-bpjph-terima-detikcom-award-2024-sebagai-lembaga-inovatif-penggerak-ekosistem-halal>
- Kemenag. (2021). *Dukung Kawasan Industri Halal, BPJPH Tekankan Sistem Ketertelusuran Produk*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/dukung-kawasan-industri-halal-bpjph-tekankan-sistem-ketertelusuran-produk-jgj07k>
- Kemenag. (2023). *Afirmasi UMK, Kemenag: Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare Diperketat*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/afirmasi-umk-kemenag-pengawasan-sertifikasi-halal-self-declare-diperketat-ZkTS3>
- Kemenag. (2024). *BPJPH Kemenag Kembali Buka Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis, Ini Cara Daftarnya*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-kemenag-kembali-buka-satu-juta-sertifikasi-halal-gratis-ini-cara-daftarnya-kclBe>
- Kemenko PMK. (2020). *Pemerintah Permudah Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK Untuk Hadapi Tantangan Global | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-permudah-sertifikasi-halal-bagi-pelaku-umk-untuk-hadapi-tantangan-global>
- Lady Yulia. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam, Vol.8. No.1*.
- Mau Urus Sertifikasi Halal? Ajukan Lewat Aplikasi PUSAKA Kemenag | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). <https://bpjph.halal.go.id/detail/mau-urus-sertifikasi-halal-ajukan-lewat-aplikasi-pusaka-kemenag>
- Muhammad Zulfikar Yusuf. (2022). PELUANG INDONESIA DALAM PUSARAN INDUSTRI HALAL DUNIA. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No.1*, 101–117.
- Munawwarah Sahib, Nur Ifna. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 6 Nomor 1*.
- Proses sertifikasi mengikuti alur yang ditetapkan dalam UU JPH, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penetapan kehalalan, hingga penerbitan sertifikat halal—Penelusuran Google*. (2023). https://www.google.com/search?q=Proses+sertififikasi+mengikuti+alur+yang+ditetapkan+dalam+UU+JPH,+mulai+dari+pendaftaran,+pemeriksaan,+penetapan+kehalalan,+hingga+penerbitan+sertifikat+halal&sca_esv=492959cb0fa9f70d&sxsrf=ADLYWII7Bh-56sRnqh0hJ5WuL0ALQHnsJA:1730199007797&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiAnYDKtbOJAXX1TGwGHcpdPeoQ0pQJegQIAhAD&biw=1280&bih=499&dpr=1.5

- Rahmawati, Husni Thamrin. (2022). Overview Industri Halal di Perdagangan Global. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 5 Nomor 2*,.
- Raya Sulistyowati, Dian Anita Nuswantara, Apriana H.J. Fanggalda, Paulina Yuritha Amtiran. (2024). Program pengabdian kepada masyarakat nasional: Pelatihan digital marketing dan digitalisasi akuntansi bagi UMKM di pulau Madura. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Volume 8, Nomor 3*, hal. 3025-3032.
- Tabitha Intana Tandepadang, Jariyah, Hadi Munarko. (2023). SOSIALISASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH) DI UD SOFIA COOKIES WIYUNG, SURABAYA. *DedikasiMU (Journal of Community Service), Volume 5, Nomor 3*,.
- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM Di INDONESIA: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada Media.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2021). *Buku Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Warto, Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2 No. 1*, 98–112.